

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah: Studi Empiris pada OPD Provinsi Sumatera Barat

Tasya Aulia Syafdan^{1*}, Fefri Indra Arza²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: tasyasyafdan@gmail.com

Tanggal Masuk:

03 November 2023

Tanggal Revisi:

12 Februari 2024

Tanggal Diterima:

15 Februari 2024

Keywords: *Government Financial Performance; Regional Financial Management; Regional Financial Accounting System.*

How to cite (APA 6th style)

Syafdan, T. A., & Arza, F. I. (2024). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah: Studi Empiris pada OPD Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 6 (1), 284-295.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1368>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

This study aims to analyse the influence of regional financial management and regional financial accounting system on government financial performance. The research was conducted at the West Sumatera Province Regional Apparatus Organization. The sampling technique uses purposive sampling. Method Data collection was carried out using a questionnaire. Regression analysis Multiple tests were carried out to test the hypothesis using SPSS 20 with results research shows that regional financial management has a positive effect on government financial performance while the regional financial accounting system does not has an influence on the government's financial performance.

PENDAHULUAN

Sorotan publik mengenai kinerja keuangan pemerintah sering diperbincangkan karena pemerintah masih tidak konsisten dalam memberikan hasil yang diharapkan. Tuntutan publik akan kurangnya kinerja pemerintah sejalan dengan adanya otonomi daerah dan penetapan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah (Widajatun & Kristiastuti, 2020). Peraturan pemerintah nomor 12 pasal 3 tahun 2019 menyebutkan bahwa kinerja keuangan yang baik dilihat dari pengelolaan keuangan daerah yang diselenggarakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kinerja keuangan pemerintah dilihat dalam Laporan Kinerja Provinsi Sumatera Barat dengan rincian dalam LHP Pengelolaan Belanja yang masih terdapat ketidaksesuaian terkait

Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan belanja daerah seperti kelebihan pembayaran jasa penyelenggaraan acara pada lima OPD sebesar Rp. 54.378.223,00 yang awalnya dianggarkan sebesar Rp. 61.057.692.450,00. Hal ini terjadi karena Kepala masing-masing OPD tidak optimal dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan di satuan kerjanya dan juga PPK-OPD dan PPTK masing-masing kegiatan pada OPD terkait tidak cermat dalam memverifikasi bukti pertanggungjawaban jasa penyelenggaraan acara sesuai tugas dan tanggungjawabnya. Selanjutnya terdapat belanja yang tidak sesuai ketentuan pada Dinas Pemuda dan Olahraga terkait belanja penyelenggaraan seleksi dan pelatihan Paskibra salah satunya mengenai pertanggungjawaban biaya penginapan kegiatan Studi Tiru yang tidak sesuai kondisi senyatanya minimal sebesar Rp. 58.548.000,00. Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 141 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih (BPK, 2022).

Laporan Kinerja Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 menyatakan bahwa Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai 77,77 dengan peringkat BB berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor: B/815/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2022. Implementasi SAKIP pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mengalami peningkatan. Namun, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih menemukan hambatan/kendala sebagai berikut dalam meningkatkan implementasi SAKIP berupa masih belum meratanya komitmen dan pemahaman pimpinan Perangkat Daerah dalam mengawal penerapan SAKIP pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya, masih belum optimalnya penerapan SAKIP ke level individu, benturan kebijakan yang berdampak pada kurang optimalnya penerapan SAKIP, masih belum meratanya pemahaman evaluator internal dalam melakukan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (Laporan Kinerja, 2022).

Faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah ialah pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja menunjukkan adanya akuntabilitas kinerja yang terdapat keterkaitan antara sasaran dan strategis yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang dialokasikan. (Hidayat, 2015). Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan ialah sistem akuntansi keuangan daerah. Para pengguna anggaran perlu memahami dengan baik mengenai siklus pencatatan yang ada pada sistem akuntansi keuangan daerah yang menggambarkan setiap tahapan dalam proses yang dilakukan (Dwi et al., 2015). Sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai tidak hanya memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisien, dan keabsahan pembelajaran dana, tetapi juga untuk mendukung pencapaian kinerja pemerintah (Hidayat, 2015).

Stewardship theory yang dikemukakan oleh Donaldson & Davis (1991) mengasumsikan bahwa teori *stewardship* ini menunjukkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan keberhasilan suatu organisasi. Teori *stewardship* melihat manajemen (*steward*) sebagai tulang punggung keberhasilan suatu organisasi yang mana keberhasilan dari manajemen dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan akan meningkatkan kesejahteraan *stakeholder* dan pengelola dari organisasi tersebut (Jefri, 2018). Teori ini menyatakan bahwa jika suatu organisasi dapat mencapai kesuksesan melalui proses kerja organisasi yang efektif dan efisien, maka akan menciptakan nilai *stakeholder* dan pertumbuhan organisasi.

Motivasi peneliti dalam melakukan penelitian mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah dikarenakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum menyusun indikator kinerja kegiatan secara selaras dan terukur serta belum melakukan capaian kinerja secara memadai. Penelitian

ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya berupa perbedaan pada objek penelitian, penelitian ini menggunakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori *stewardship* sebagai *grand theory* dan juga penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2015.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori *Stewardship*

Stewardship didefinisikan sebagai sikap dan perilaku yang menunjukkan komitmen terhadap privasi sambil mengejar tujuan yang menjunjung tinggi hak privasi individu (Hernandez, 2008). Teori yang dimaksud menegaskan bahwa ada korelasi yang kuat antara keberhasilan organisasi dan kelemahan organisasi (Donaldson & Davis, 1991). *Steward* (pemerintah) akan memantau dan memaksimalkan efektivitas organisasi sejalan dengan operasi bisnis sehingga fungsinya maksimal. Teori ini menyatakan bahwa jika suatu organisasi dapat mencapai kesuksesan melalui proses kerja organisasi yang efektif dan efisien, maka akan menghasilkan penciptaan nilai pemangku kepentingan dan pertumbuhan organisasi.

Dalam teori *Stewardship*, pemerintah (*Steward*) berfungsi sebagai pengelola sumber daya dan rakyat (*principal*) berfungsi sebagai pemilik sumber daya. Hal ini menyebabkan terjadinya kesepakatan antara *Steward* (pemerintah) dan *principal* (rakyat) yang didasarkan pada kepercayaan kolektif sesuai dengan tujuan organisasi (Jatmiko, 2020). Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat sehingga teori ini dapat diterapkan dalam model kasus organisasi sektor publik. Manajemen pemerintah seringkali bertindak sebagai *Steward* karena dipengaruhi oleh jenis layanan yang disediakan, tingkat kapasitas administrasi publik, insentif dan sanksi yang digunakan, dan frekuensi informasi yang diperlukan (Jatmiko, 2020). Teori *Stewardship* pada penelitian ini berimplikasi dengan menjelaskan bahwa manajemen OPD di Provinsi Sumatera Barat dituntut untuk memberikan pelayanan (*Steward*) bagi kepentingan publik (*principal*).

Kinerja Keuangan Pemerintah

Kinerja keuangan pemerintah menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ialah hasil dari suatu kegiatan atau program yang dicapai secara kualitas dan kuantitas yang terukur sesuai dengan anggaran (Nasution, 2019). Indikator kinerja keuangan pemerintah daerah menurut Nasution (2019) ialah (1) indikator masukan (input) merupakan segala sesuatu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan. (2) Indikator proses (process) merumuskan ukuran kegiatan kegiatan dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan. (3) Indikator keluaran ialah sesuatu yang diharapkan langsung dapat diperoleh atau dicapai dari suatu kegiatan. (4) Indikator hasil (*outcome*) dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh benar-benar dapat dimanfaatkan sebagaimana yang dimaksudkan untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. (5) Indikator manfaat (*benefit*) ialah manfaat yang diperoleh dari hasil (*outcomes*) suatu kegiatan.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 pasal 1 mengenai pengelolaan keuangan daerah ialah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap keuangan daerah (Darlis & Al Azhar, 2017). Pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan mengelola

keuangan daerah dengan sebaik-baiknya agar seluruh hak dan kewajiban daerah terpenuhi dan dapat dipergunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan daerah. Prinsip pengelolaan keuangan daerah digunakan untuk mengendalikan kebijakan keuangan suatu daerah. Kebijakan yang dihasilkan tersebut harus dapat diakses secara vertikal maupun horizontal dan dikomunikasikan dengan pengelola keuangan dan anggaran daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis (Defitri et al., 2018).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengenai Sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) merupakan serangkaian yang dimulai dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas-entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) (Dwi et al., 2015).

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Nasution (2019) mengatakan bahwa peningkatan kinerja keuangan pemerintah didapat dari pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan dengan baik sebaliknya pengelolaan keuangan daerah yang buruk akan membuat kinerja keuangan suatu pemerintah daerah akan menurun. Sejalan dengan pendapat Rosliyati et al. (2020) yang mengatakan bahwa peningkatan kinerja keuangan yang di dapat melalui optimaliasasi pengelolaan keuangan diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dalam pengoptimalannya harus dilakukan secara konsisten dengan perencanaan jangka panjang, jangka pendek dan perencanaan nasional. Pengelolaan keuangan daerah mengakui bahwa untuk mencapai tujuan, harus ada peningkatan dan alokasi sumber daya yang efisien dalam organisasi. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien berkaitan langsung dengan kinerja keuangan pemerintah daerah yang berarti semakin efektif dan efisien pengelolaan keuangan daerah maka kemungkinan kinerja keuangan daerah akan semakin baik (Mutya & Josephine, 2018). Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti memiliki dugaan sementara yaitu:
H₁: Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan dan dapat dijadikan pedoman dalam menyajikan informasi yang diperlukan berbagai pihak (Nova Lintong et al., 2017). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wati et al. (2022) yang menyatakan bahwa sistem keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Sistem akuntansi yang baik nantinya akan menyediakan informasi yang andal dan relevan sehingga keputusan yang dilahirkan akan baik. Sistem akuntansi yang memberikan informasi atas anggaran yang telah terlaksana sesuai dengan yang telah ditetapkan akan menimbulkan dukungan atas kinerja keuangan pemerintah. Pendapat tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sani & Bawono (2022) dan Hidayat (2015) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang dilakukan secara optimal dapat memberikan dukungan yang kuat terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti memiliki dugaan sementara yaitu :
H₂ : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausalitas dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini ialah OPD Provinsi Sumatera Barat dengan teknik pemilihan sampel ialah *purposive sampling* yang mencakup Badan dan Dinas di Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini sampel pada penelitian ini ialah sebanyak 32 OPD Provinsi Sumatera Barat dengan total responden sebanyak 64 responden dengan responden masing-masing OPD sebanyak 2 responden. Kriteria yang dijadikan sampel pada penelitian ini ialah pejabat struktural dan aparat yang melaksanakan fungsi pengelolaan anggaran/ tata usaha keuangan pada masing-masing OPD yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan memiliki masa kerja minimal 1 tahun pada periode penyusunan anggaran daerah. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner pada Kasubbag. Keuangan dan Staff Subbag. Keuangan pada tiap OPD. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan program SPSS 20. Tahapan yang dilakukan pengujian hipotesis ini ialah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji kualitas data, dan pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pengembalian Kuesioner

Tabel 1
Tingkat Pengembalian Kuesioner

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah angket yang disebar	64
2.	Jumlah angket yang kembali	60
3.	Jumlah angket yang dapat diolah	60
Responden Rate		93,75%

Berdasarkan tabel diatas, kuesioner yang disebar sebanyak 64 kuesioner dengan tingkat pengembalian sebanyak 93,75% yang berarti terdapat kuesioner yang disebar sebelumnya tidak kembali dan tidak lengkap untuk diolah.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2
Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengelolaan Keuangan Daerah	60	35	50	42,87	3,766
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	60	43	55	48,63	4,146
Kinerja Keuangan Pemerintah	60	33	50	42,70	3,212
Valid N (listwise)	60				

Dari tabel diatas diketahui sampel pada penelitian berjumlah 60 responden. Setiap variabel menggunakan skala likert dengan skor 1 sampai dengan 5. Pada variabel pengelolaan keuangan daerah dengan 10 pernyataan memiliki nilai minimum 35 dan maksimum 50 dengan rata-rata 42,87 dan standar deviasi sebesar 3,766. Variabel sistem akuntansi keuangan daerah dengan 11 pernyataan memiliki nilai minimum 43 dan maksimum 55 dengan rata-rata 48,63 dan standar deviasi sebesar 4,146. Variabel kinerja keuangan daerah dengan 10 pernyataan memiliki nilai minimum 33 dan maksimum 50 dengan rata-rata 42,70 dan standar deviasi 3,212.

Uji Kualitas Data
Uji Validitas

Tabel 3
Uji Validitas

Instrumen Variabel	Nilai <i>corrected item – total correlation</i>	Keterangan
Kinerja Keuangan Daerah (Y)	0,324	Valid
Pengelolaan Keuangan Daerah (X1)	0,371	Valid
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)	0,391	Valid

Nilai *corrected item – total correlation* untuk variabel kinerja keuangan pemerintah ialah 0,324, variabel pengelolaan keuangan daerah ialah 0,371, dan variabel sistem keuangan daerah ialah 0,391. Nilai *corrected item – total correlation* ini tiap variabel lebih besar daripada nilai r tabel, yaitu 0.2542. Jadi, nilai masing-masing item pernyataan tersebut ialah valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 4
Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kinerja Keuangan Pemerintah (Y)	10	0,630	Reliabel
Pengelolaan keuangan daerah (X1)	10	0,799	Reliabel
Sistem keuangan daerah (X2)	11	0,896	Reliabel

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa hasil dari uji reliabilitas memperoleh nilai koefisien reliabilitas (*Cronbach's Alpha*) yang lebih besar dari 0,6. Sesuai dengan pendapat Ghozali (2005) bahwa instrument dinyatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* besar dari 0,6. Dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian ini reliabel (dapat diandalkan).

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Tabel 5
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2,50804247
	Absolute	,093
Most Extreme Differences	Positive	,063
	Negative	-,093
Kolmogorov-Smirnov Z		,720
Asymp. Sig. (2-tailed)		,678

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa uji normalitas menggunakan metode *Asymp. Sig. (2-tailed)* diperoleh nilai uji normalitas sebesar 0,678 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal dan telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolenearitas

Tabel 6
Uji Multikolenearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Pengelolaan Keuangan Daerah	,601	1,665
1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	,601	1,665

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* variabel pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah yaitu sebesar 0,601. Hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai *tolerance* > 0,10. Nilai *variance inflation factor* (VIF) dari variabel pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah yaitu sebesar 1,665. Hasil perhitungan nilai VIF menunjukkan masing-masing variabel nilai VIF <10. Artinya, tidak terjadi multikolenearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7
Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
	(Constant)	-2,938	2,799		1,050
1 Pengelolaan Keuangan Daerah	,001	,075	,002	,011	,991
1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	,097	,068	,238	1,436	,157

a. Dependent Variable: ABRESID

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat nilai signifikansi dari variabel pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah yaitu sebesar 0,991 dan 0,157. Nilai signifikansi dari masing-masing variabel indepen menunjukkan nilai signifikansi > 0,05. Artinya tidak terdapat heteroskedastisitas pada model regresi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8
Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
	(Constant)	-2,938	2,799		-1,050
1 Pengelolaan Keuangan Daerah	,001	,075	,002	,011	,991
1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	,097	,068	,238	1,436	,157

a. Dependent Variable: ABRESID

Secara sistematis, hasil uji regresi berganda dapat dilihat sebagai berikut :

$$Y = 18,622 + 0,477X_1 + 0,075X_2 + 4,265$$

Berikut ini penjelasan dari persamaan regresi diatas, sebagai berikut :

- Nilai konstanta diperoleh dari persamaan ini ialah 18,622 yang artinya variabel independen yang terdiri dari pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah bernilai 0 atau dianggap konstan, maka besar variabel kinerja keuangan pemerintah sebesar 18,622.
- Nilai koefisien regresi pengelolaan keuangan daerah 0,477 yang berarti jika variabel independen lain tetap, maka untuk setiap kenaikan per satuan variabel pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan variabel kinerja keuangan pemerintah sebesar 47,7%.
- Nilai koefisien regresi sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 0,075 yang berarti jika variabel independen lain tetap, maka untuk setiap kenaikan per satuan variabel sistem akuntansi keuangan daerah akan meningkatkan variabel kinerja keuangan pemerintah sebesar 7,5%.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,625 ^a	,390	,369	2,552

a. Predictors: (Constant), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah

Berdasarkan tabel tersebut, nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,369. Hal ini menunjukkan kemampuan variabel independen, yaitu pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi dalam menjelaskan variabel dependen, yaitu pencegahan *fraud* adalah sebesar 36,9%. Sedangkan untuk sisanya, yaitu 63,1% ditentukan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Uji Regresi Simultan (Uji F)

Tabel 10
Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	237,474	2	118,737	18,236	,000 ^b
1 Residual	371,126	57	6,511		
Total	608,600	59			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah

b. Predictors: (Constant), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan tabel tersebut, nilai F hitung sebesar 18,236 dengan nilai Sig. 0,000 yang berarti nilai signifikannya lebih kecil dari tingkat signifikan yaitu sebesar 0,05. Jika dilihat

dari nilai F, nilai F hitung lebih besar dari F tabel sebesar $18,236 > 3,159$. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterimayang berarti variabel pengelolaan keuangan daerah (X1) dan sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah.

Uji Regresi Parsial (Uji T)

Tabel 11
Uji T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	18,622	4,265		4,366	,000
1 Pengelolaan Keuangan Daerah	,477	,114		,559	4,190 ,000
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	,075	,103		,097	,724 ,472

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah

Berdasarkan tabel tersebut, hasil Uji T dapat disimpulkan sebagai berikut: Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah Pengelolaan keuangan daerah memiliki nilai t hitung sebesar 4,190 lebih besar dari nilai t tabel ($4,190 > 1.67203$), dan nilai β sebesar 0,477. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai t hitung sebesar 0,724 lebih besar dari nilai t tabel ($0,724 < 1,67203$), dan nilai β sebesar 0,075. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Pembahasan

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil dari uji statistik t pada tabel, nilai t hitung variabel pengelolaan keuangan daerah lebih besar dari nilai t tabel, yaitu $4,190 > 1.67203$, dan nilai β sebesar 0,477. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 diterima yang berarti variabel pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah efektif. Pengelolaan keuangan yang efektif berkaitan langsung dengan kinerja keuangan pemerintah karena di dapat dari optimalisasi pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dalam pengoptimalannya harus dilakukan secara konsisten.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosliyati et al. (2020) dan Mutya & Josephine (2018) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Semakin tinggi atau baik pengelolaan keuangan daerah di lingkup OPD Provinsi Sumatera Barat, maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah di lingkup OPD Provinsi Sumatera Barat. Artinya, pengelolaan keuangan daerah pada lingkup OPD Provinsi Sumatera Barat sudah diterapkan dan dijalankan dengan baik.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Berdasarkan hasil dari uji statistik t pada tabel 4.21, nilai t hitung variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah lebih kecil dari nilai t tabel, yaitu $0,724 < 1,67203$, dengan nilai β 0,075. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 2 ditolak. Artinya, variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah pada OPD Provinsi Sumatera Barat tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Hal ini berarti bahwa pemahaman pegawai di OPD Sumatera Barat terhadap sistem akuntansi keuangan daerah tidak berdampak pada kinerja mereka dalam mengelola keuangan daerah OPD Provinsi Sumatera Barat. Hal ini tidak mampu membuktikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah akan mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah di OPD Sumatera Barat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2021) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wati et al (2022), Sani & Bawono (2022), dan Hidayat (2015) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang dilakukan secara optimal dapat memberikan dukungan yang kuat terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah.

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah, serta sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya, penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner. Data penelitian yang berasal dari responden yang disampaikan secara tertulis akan mempengaruhi hasil penelitian dikarenakan persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara. Selain itu, peneliti dalam mendapatkan data dari responden tidak dapat bertemu responden secara langsung dan hanya diperbolehkan untuk dititipkan karena kesibukan dari responden itu sendiri serta peraturan dari pemerintah bahwa dalam penelitian tidak diperbolehkan mengganggu jam kerja pegawai.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan tersebut, saran yang bisa diberikan peneliti adalah penelitian ini masih terbatas pada pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi terhadap kinerja keuangan pemerintah, untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan terhadap variabel bebas penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah data berupa hasil wawancara dari beberapa responden penelitian dan laporan keuangan agar tidak hanya terbatas pada daftar pertanyaan kuesioner saja. Serta, disarankan

menambah jumlah instansi/perusahaan yang akan dijadikan sampel penelitian untuk mempresentasikan penelitian selanjutnya yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2019). *Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat*.
- Darlis, E., & Al Azhar, D. (2017). The Effect Of Financial Accounting System, Financial Management Area, And Good Governance Of Local Government Performance. In *JOM Fekon* (Vol. 4, Issue 1).
- Defitri, S. Y., Mahaputra, U., & Yamin, M. (2018). *Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah*. 3(1), 64–75.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Dwi, Y., Pembimbing, J., Yusraini, :, & Rusli, D. (2015). Influence Of Good Governance, Financial Management Area and Financial Accounting System Area To Local Government Performance (Empirical Study On Government Dumai). In *Jom FEKON* (Vol. 2, Issue 2).
- Hernandez, M. (2008). Promoting stewardship behavior in organizations: A leadership model. *Journal of Business Ethics*, 80(1), 121–128. <https://doi.org/10.1007/s10551-007-9440-2>
- Hidayat, R. (2015). *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja pemerintah Daerah*.
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231–246. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446>
- Jefri, R. (2018). Teori stewardship dan good governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 4(3), 14–28.
- Laoli, V. (2019). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value of Money pada Pemerintah Kabupaten Nias. *Owner*, 3(1), 91. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.108>
- Mutya, T., & Josephine, A. (2018). Financial Management a Wheel to Financial Performance of Local Governments in Uganda: A Case Study of Tororo Municipal Council. *Journal of Business & Financial Affairs*, 07(02). <https://doi.org/10.4172/2167-0234.1000330>
- Nasution, D. (2019). Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 149–162.
- Nova Lintong, D., Paul Elia Saerang, D., Ilat, V., Akuntansi, J., Ekonomi dan Bisnis, F., Sam Ratulangi, U., & Kampus Bahu, J. (2017). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Kotamobagu. In *Jurnal Accountability* (Vol. 06).
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Laporan Kinerja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
- Rosliyati, A., Siliwangi, U., Government, R., & Rosliyati, A. (2020). *Financial Management As The Success Measurement Of Financial Performance Of Regional*. 17(9), 3306–3315.
- Sani, R. M., & Bawono, A. D. B. (2022). The Influence of Accounting Systems, Internal

- Control, And Transparency of Regional Financial Management on The Performance of Local Governments. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 12(10), 452–456. <https://doi.org/10.29322/ijsrp.12.10.2022.p13059>
- Wati, R., Kusuma, I. L., & Kristiyanti, L. (2022). the Effect of Regional Financial Management, Regional Financial Accounting Systems and Internal Control Systems Government on the Regional Government Perfomance (Case Study on Bkd in Boyolali Regency). *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(3), 1260–1268. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i3.6279>
- Widajatun, V. W., & Kristiastuti, F. (2020). The Effect of Regional Financial Supervision, Accountability and Transparency of Regional Financial Management on Local Government Performance. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(4), 2966–2974. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i4.1319>